



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KURNIAWAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 725545

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.045.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/21 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/84 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 370 m2/36 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 775.000.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/21 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 141.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA G Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.497.813

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.226.497.813



III. HUTANG

Rp. 321.747.384

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.904.750.429

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.